

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta).
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah*. (Jakarta : Prestasi Pustaka).
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research jilid 4*. (Yogyakarta : Andi).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya : Bina Ilmu).
- Haji, Mustofa & Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta : Djambatan).
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing).
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Liberty).
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung : Tarsito).
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perpesktif Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers).
- Parlindungan, A.P. 1990. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. (Bandung : Mandar Maju)
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan IX. (Jakarta Balai Pustaka).
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. (Malang : Setara Press).
- Santoso, Urip. 2011. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press).
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia).

Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. (Malang : Setara Press).

Sudjito. 1887. *Prona : Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. (Yogyakarta : Liberty).

Sumardjono, S.W, Maria. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta : Buku Kompas).

Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. (Jakarta : Sinar Grafika).

B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Skripsi

Andari, Cicilia Putri & Purwoatmodjo, Djumadi. (2019). *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jurnal Notarius Universitas Diponegoro). Volume 12 Nomor 2.

Hakim, Rachseria Isneni, Pujiwati, Yani, & Rubiaty, Betty. (2018). *Hak Prioritas Dalam Perolehan Tanah Hak Guna Bangunan Yang Habis Jangka Waktunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal*. (Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran). Volume 1 Nomor 2.

Mujiburohman, Aries Dian. (2016). *Problematisa Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir*. (Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan). Volume 2 Nomor 2.

Patajai, Sitti Maryam. *Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah*. (2019). (Fakultas Hukum UMI : Al-Ishlah). Volume 21 Nomor 1.

Rohman, Zahrah Farhataeni & Sugiyono, Heru. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara*. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta : Lex Librum. Jurnal Ilmu Hukum). Volume 9 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (selanjutnya disebut KEPPRES 32/1979).

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: Btu. 8/356/8/79.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 282/Pdt.G/2018/PN.Smg.

D. Website

Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management)” disusun oleh Pokja RPP Pengelolaan BMN/D Pada KPMK, <http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm>.

<https://nusindo.co.id/sejarah-nusindo/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/13176/Sertifikasi-Tanah-Upaya-Mengamankan-Aset-Negara.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hgb-hak-guna-bangunan-cl677>

